



**APAKAH PROGRAM “JAMULA” BERDAMPAK
TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN?
DITINJAU DARI TEORI MERILEE GRINDLE**

^{1*)}Ahmad Sayuti Royali, ^{2*)}Vicky Ardhana, ^{2*)}Mellysa Nur Awalia, ^{3*)}Farra Ummush Sholiha

^{1*)}Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, ^{2*)}Universitas Trunojoyo, ^{3*)}Universitas Sebelas Maret

e-mail: ^{*)}ahmadsayutiroyali@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh isi kebijakan dan konteks implementasi dalam teori Merilee Grindle dari kebijakan Jamula di jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi Desa Pucangro terhadap dampak serta perubahan dan penerimaan masyarakat kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan eksploratori. Sampel penelitian ini berjumlah 100 orang dari masyarakat Kabupaten Lamongan dan sampel tersebut didapatkan dari teknik sampling nonprobability sampling dengan jenis snowball sampling. Data yang telah didapatkan kemudian diolah menggunakan alat analisis Structural Equation Model berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hipotesis penelitian ini adalah variabel isi kebijakan dan variabel konteks implementasi dari kebijakan Jamula di jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi Desa Pucangro memiliki pengaruh terhadap variabel dampak serta variabel perubahan dan penerimaan. Hasil pengujian menunjukkan isi kebijakan memiliki pengaruh terhadap dampak, isi kebijakan memiliki pengaruh terhadap perubahan dan penerimaan, serta konteks implementasi memiliki pengaruh terhadap perubahan dan penerimaan. Terdapat satu hipotesis yang tidak terbukti secara empiris, yaitu konteks implementasi tidak berpengaruh terhadap dampak. Kesimpulan penelitian ini yaitu: (1) ketiga hipotesis yang didasarkan pada teori model implementasi merilee grindle dapat diterima atau dapat dibuktikan secara empiris; (2) satu hipotesis ditolak yaitu pengaruh konteks implementasi terhadap dampak dan penulis berasumsi konteks implementasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lamongan tidak efektif, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak positif dari kebijakan Jamula di jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi Desa Pucangro. Program Jamula memberikan manfaat positif bagi masyarakat, sehingga pemerintah harus responsif dan tepat waktu dalam perbaikan jalan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kata kunci : Barang Publik; Kebijakan Jamula; Model Implementasi Kebijakan; Merilee Grindle

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of policy content and implementation context in the Merilee Grindle theory of the Jamula policy on the Sukodadi-Sumberwudi highway of Pucangro Village on the impact and changes and acceptance of the people of Lamongan district. This research was conducted quantitatively with an exploratory approach. The sample of this study amounted to 100 people from the people of Lamongan Regency and the sample was obtained from a nonprobability sampling technique with snowball sampling. The data obtained is then processed using the Structural Equation Model analysis tool based on Partial Least Square (SEM-PLS). The hypothesis of this study is that the policy content variable and the implementation context variable of the Jamula policy on the Sukodadi-Sumberwudi highway of Pucangro Village have an

influence on impact variables as well as change and acceptance variables. The test results show that policy content has an influence on impact, policy content has an influence on change and acceptance, and the context of implementation has an influence on change and acceptance. There is one hypothesis that is not empirically proven, namely that the context of implementation has no effect on impact. The conclusions of this study are: (1) the three hypotheses based on the theory of the merilee grindle implementation model are acceptable or empirically provable; (2) one hypothesis is rejected is the influence of the implementation context on the impact and the author assumes that the implementation context carried out by the Lamongan Regency government is ineffective, so that the community does not feel the positive impact of the Jamula policy on the Sukodadi-Sumberwudi highway in Pucangro Village. The Jamula program provides positive benefits to the community, so the government must be responsive and timely in repairing roads to increase community satisfaction.

Keywords: *Public Goods; Jamula Policy; Merilee Grindle Implementation Mode*

I. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pembangunan jalan raya sebagai investasi utama untuk mendorong pembangunan ekonomi juga dilakukan pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan pembangunan jalan raya yang bernama Jamula atau Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Kebijakan Jamula diimplementasikan melalui peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat serius dalam mengimplementasikan kebijakan ini, yaitu ditunjukkan dari pembuatan skema pinjaman hingga 200 miliar rupiah serta menyelesaikan pembangunan dan perbaikan jalan raya secara masif dalam waktu yang singkat, yaitu 53 ruas jalan di tahun 2022 saja (lamongankab.go.id).

Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat serius mengimplementasikan kebijakan Jamula karena status dari kebijakan ini. Pemerintah Kabupaten Lamongan bahkan menjadikan status kebijakan Jamula sebagai program super prioritas (lamongankab.go.id). Kebijakan Jamula berstatus program super prioritas dilatarbelakangi oleh dua alasan utama. Alasan yang pertama yaitu banyak ruas jalan raya yang sudah mencapai usia rusak dan alasan yang kedua yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan, terutama pasca adanya pandemi Covid-19. Secara teoritis dan bukti empiris menyatakan pembangunan jalan raya berdampak positif untuk pembangunan ekonomi, namun pernyataan tersebut masih menjadi perdebatan para ahli. Penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya dampak pembangunan jalan raya yang sebaliknya. Penelitian dari Wang et al. (2020) menyatakan kebijakan pembangunan jaringan jalan raya berupa Belt and Road Initiative (BRI) yang masif di negara Asia Selatan justru berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagian



penyebabnya adalah jalan raya yang dibangun memiliki kualitas yang buruk, sehingga terdapat indikasi proses implementasi pembangunan yang tidak baik. Penelitian Ji et al. (2019), Mohmand (2016), dan Gagliardi dan Percoco (2016) juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan pembangunan jalan raya terhadap pembangunan ekonomi.

Keberhasilan implementasi kebijakan digambarkan sebagai keberhasilan untuk mencapai tujuan kebijakan Jamula, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Implementasi jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro dapat menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan Jamula karena memiliki peran penting bagi Kabupaten Lamongan dan berstatus sebagai proyek percontohan. Pengaruh implementasi kebijakan terhadap keberhasilan kebijakan dapat diketahui melalui model implementasi yang dikembangkan oleh para ahli, salah satunya adalah model implementasi merilee grindle. Model merilee grindle merupakan model implementasi yang dikembangkan pakar kebijakan publik bernama Merilee Serill Grindle. Merilee Grindle (1980) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel penting, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan diukur melalui kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Konteks implementasi diukur melalui kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Kedua variabel tersebut harus dipersiapkan dengan baik oleh pelaksana kebijakan karena berpengaruh pada keberhasilan kebijakan yang digambarkan sebagai hasil kebijakan, yaitu dampak serta tingkat perubahan dan penerimaan pada penerima kebijakan. Model merilee grindle dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Jamula ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro terhadap hasil kebijakan yang diterima masyarakat Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diketahui apakah tujuan dari kebijakan ini sudah tercapai atau tidak. Pengaruh tersebut penting untuk diteliti, akan tetapi penelitian terdahulu mengenai kebijakan Jamula justru meneliti pengaruh tahap implementasi terhadap keberhasilan pembangunan jalan raya secara fisik, seperti penelitian Aslur dan Tukiman (2023) dan Alim et al. (2022). Kedua penelitian tersebut tidak meneliti dampak serta tingkat perubahan dan penerimaan dari masyarakat Kabupaten Lamongan. Penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan Jamula pada ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro terhadap hasil kebijakan merupakan isu yang penting, namun belum ditemui penelitian terdahulu yang meneliti

fenomena tersebut, sehingga perlu dilakukan analisis pengaruh isi kebijakan dan konteks implementasi dalam teori Merilee Grindle dari kebijakan Jamula di jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi Desa Pucangro terhadap dampak serta perubahan dan penerimaan masyarakat kabupaten Lamongan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Barang Publik

Barang publik merupakan barang yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi nilainya, bahkan dapat dinikmati tanpa mengeluarkan biaya (Yunus dan Anwar, 2021). Senada dengan pendapat tersebut, Khusaini (2019) mendefinisikan barang publik sebagai barang yang dibutuhkan dan dinikmati oleh banyak orang, namun tidak ada yang dapat membatasi siapa penggunaannya dan sedapat mungkin tidak mengeluarkan biaya saat memanfaatkannya. Barang publik dapat tercipta karena tidak ada mekanisme pasar yang menyediakannya dan tidak ada pelaku ekonomi yang mampu ataupun yang mau menyediakan barang publik (Khusaini, 2019). Tidak adanya pelaku ekonomi yang mampu dan mau menyediakan barang publik dapat disebabkan oleh return (pengembalian) yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan barang privat (Waluyo, 2022). Penyediaan barang publik membutuhkan biaya yang besar, sehingga harus melibatkan campur tangan pemerintah. Pemerintah hakikatnya dapat terbentuk hanya karena diadakan oleh publik atau masyarakat. Hughes menyatakan bahwa organisasi pemerintah diciptakan oleh publik, untuk publik, dan harus bertanggung jawab terhadapnya, sehingga pemerintah bertanggung jawab kepada publik, baik dalam memenuhi kebutuhan maupun menyelesaikan masalah masyarakat (Widodo, 2021).

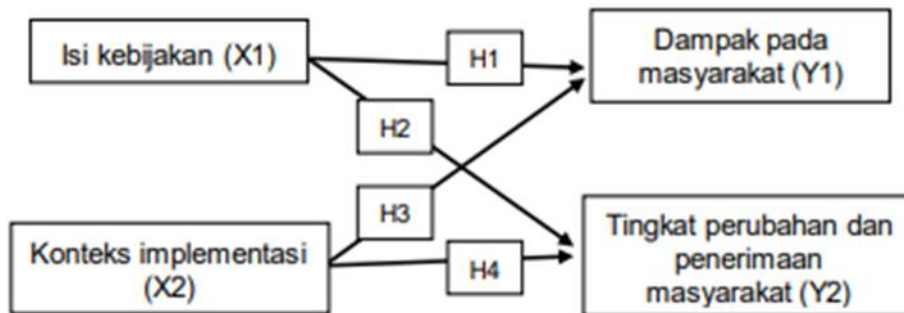
2.2 Model Implementasi Kebijakan dalam Teori Merilee Grindle

Menurut Merilee Grindle (1980), implementasi kebijakan publik dimaknai sebagai “implementation is a political and administrative process (implementasi adalah proses politik dan administrasi)”. Grindle juga berpendapat bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat berbagai hal penting yang harus terpenuhi, seperti tujuan dan sasaran kebijakan yang telah dirumuskan dengan terperinci, rangkaian program aksi yang dilakukan telah dirancang dengan jelas, serta dana yang dibutuhkan telah dialokasikan dalam perwujudan tujuan, sasaran, dan program aksi tersebut. Merilee Grindle menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi dua variabel

penting, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel isi kebijakan diukur melalui: (1) kepentingan yang mempengaruhi; (2) jenis manfaat; (3) derajat perubahan; (4) letak pengambilan keputusan; (5) pelaksana program, dan; (6) sumber daya. Variabel konteks implementasi diukur melalui: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa, serta; (3) kepatuhan dan daya tanggap. Isi kebijakan dan konteks implementasi tersebut akan menjadi penentu apakah tujuan kebijakan sudah tercapai atau tidak. Kedua variabel tersebut harus dipersiapkan dengan baik oleh pelaksana kebijakan karena berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang digambarkan sebagai hasil yang dirasakan penerima kebijakan, yaitu dampak serta tingkat perubahan dan penerimaan (Grindle, 1980).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, penelitian dilakukan pada populasi atau sampel tertentu, instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data, analisis data bersifat statistik, dan menguji hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mempunyai generalisasi yang memiliki nilai prediktif (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM-PLS versi 4.0 untuk menguji hipotesis. PLS adalah teknik statistik multivariat untuk melakukan perbandingan di antara variabel yang ada. Penulis memiliki beberapa alasan menggunakan SEM-PLS, yaitu: (1) penelitian ini bertujuan untuk eksploratori; (2) data tidak perlu terdistribusi secara normal; (3) terdapat variabel dengan indikator formatif, dan; (4) dapat mengakomodasi sampel berukuran kecil (Hair et al., 2019). Jumlah sampel yang digunakan penulis pada penelitian ini berjumlah 100 orang karena penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Model berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) versi 4.0. Alat analisis SEM-PLS dapat mengakomodasi jumlah sampel yang relatif kecil (Harahap, 2020). Chin (2000) menyatakan jumlah minimal sampel dengan alat SEM-PLS adalah 30 hingga 100 responden. Objek atau variabel pada penelitian ini adalah isi kebijakan (X1), konteks implementasi (X2), dampak pada masyarakat (Y1), dan tingkat perubahan dan penerimaan (Y2). Berikut adalah Model Hipotesis Penelitian:



Gambar 1. Kerangka Hipotesis Penelitian

Keterangan:

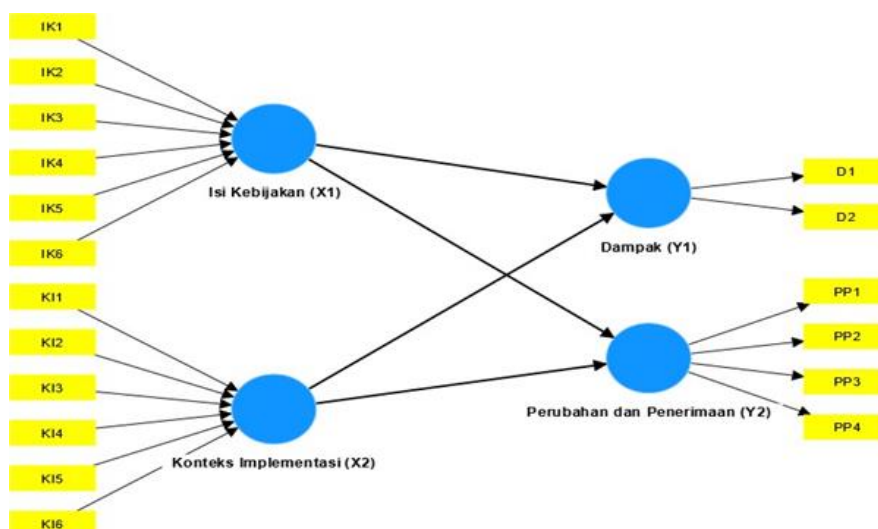
H1: Isi kebijakan berpengaruh positif terhadap dampak pada masyarakat.

H2: Isi kebijakan berpengaruh positif terhadap tingkat perubahan dan penerimaan masyarakat.

H3: Konteks implementasi berpengaruh positif terhadap dampak pada masyarakat.

H4: Konteks implementasi berpengaruh positif terhadap tingkat perubahan dan penerimaan masyarakat.

Tujuan utama pada penelitian ini adalah menguji hipotesis yang telah dirumuskan oleh penulis, akan tetapi penulis harus melakukan evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural terlebih dahulu. Berikut merupakan konstruk diagram jalur yang telah penulis susun untuk melakukan kedua evaluasi tersebut pada SEM-PLS versi 4.0.



Gambar 2. Kerangka Model SEM-PLS Penelitian



Keterangan:

- D1** : Waktu tempu perjalanan
- D2** : Konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor
- PP1** : Ketersediaan barang dan jasa
- PP2** : Harga barang dan jasa
- PP3** : Tingkat kepuasan terhadap hasil perbaikan
- PP4** : Tingkat keberlanjutan implemetasi program kembali
- LK1** : Tingkat kepentingan dan kebutuhan masyarakat terhadap proyek
- LK2** : Tingkat kebermanfaatan proyek
- LK3** : Perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat
- LK4** : Tingkat ketepatan program
- LK5** : Tingkat transparansi teknis pelepasana proyek
- LK 6** : Tingkat kualitas hasil proyek jalan raya
- KL1** : Tingkat kolaborasi antar pelaku program
- KL2** : Tingkat kepuasan penanggulangan dampak proyek
- KL3** : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemimpin daerah
- KL4** : Tingkat pengetahuan masyarakat tentang program JAMULA
- KL5** : Tingkat komitmen dan tanggungjawab pelaksana program
- KL6** : Waktu pengerjaan proyek.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran yang pertama yaitu uji pada variabel dampak (Y1) serta perubahan dan penerimaan (Y2) yang memiliki indikator. Evaluasi model pengukuran variabel dengan indikator harus memenuhi empat langkah evaluasi, yaitu: (1) *indicator reliability*; (2) *internal consistency reliability*; (3) *convergent validity*, dan; (4) *discriminant validity*. Berikut ini merupakan hasil olah data evaluasi tersebut:

a) Indicator Reliability

Evaluasi indicator reliability pada penelitian ini didasarkan pada nilai loadings factor. Penulis telah melakukan olah data dan nilai loadings factor indikator dari variabel dampak serta perubahan dan penerimaan dapat dilihat pada tabel perhitungan berikut.

Variabel	Item	Loading Factor	Keterangan
Dampak (Y1)	D1	0,949	Valid
	D2	0,935	Valid
Perubahan dan Penerimaan (Y2)	PP1	0,831	Valid
	PP2	0,767	Valid
	PP3	0,863	Valid
	PP4	0,809	Valid

Table 1. Nilai Loadings Factor
Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil olah data diatas, menunjukkan bahwa semua *item* pengukuran telah valid karena melebihi nilai minimal yang direkomendasikan, yaitu di atas 0,708 (Hair *et al.*, 2021). Nilai *loadings factor* tersebut juga mengindikasikan konstruk menjelaskan lebih dari 50% varians indikator, sehingga evaluasi *indicator reliability* mendapatkan hasil yang baik.

b) Internal Consistency Reliability

Evaluasi internal consistency reliability dilakukan dengan memeriksa nilai *Cronbach's Alpha* maupun *composite reliability* dengan hasilnya sebagai berikut:

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	Keterangan
Dampak (Y1)	0,875	0,941	Reliabel
Perubahan dan Penerimaan (Y2)	0,835	0,890	Reliabel

Table 2. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability
Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan kedua nilai tersebut memenuhi syarat yang direkomendasikan, yaitu mendapatkan nilai 0,70 hingga 0,95 (Hair *et al.*, 2021). Variabel dampak mendapatkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,875 dan *composite reliability* sebesar 0,941, sedangkan variabel perubahan dan penerimaan mendapatkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,835

dan *composite reliability* sebesar 0,890. Kedua hasil tersebut mengindikasikan setiap *item* yang mengukur variabel dampak serta variabel perubahan dan penerimaan telah konsisten atau reliabel.

c) Convergent Validity

Evaluasi convergent validity dilakukan dengan cara memeriksa nilai Average Variance Extracted (AVE). Tabel 3 merupakan hasil olah data untuk keperluan evaluasi convergent validity.

Variabel	Item	AVE	Keterangan
Dampak (Y1)	D1	0,888	Valid
	D2		Valid
Perubahan dan Penerimaan (Y2)	PP1	0,669	Valid
	PP2		Valid
	PP3		Valid
	PP4		Valid

Table 3. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan nilai AVE yang diperoleh telah memenuhi nilai minimal sebesar 0,50, yaitu variabel dampak sebesar 0,888 dan variabel perubahan dan penerimaan sebesar 0,669. Nilai tersebut berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians indikator yang membentuk konstruk tersebut (Hair *et al.*, 2021). Variasi *item* pengukuran D1 dan D2 yang ada di dalam variabel dampak sebesar 88,8% serta variasi *item* pengukuran PP1 hingga PP4 yang ada di dalam variabel perubahan dan penerimaan sebesar 66,9%.

d) Discriminant Validity

Evaluasi discriminant validity dilakukan dengan cara membandingkan nilai cross loadings item pengukuran yang harus berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya daripada nilai cross loadings pada konstruk yang lain. Berikut ini merupakan nilai cross loadings konstruk variabel dampak serta perubahan dan penerimaan masyarakat.

Item	Isi Kebijakan	Konteks Implementasi	Dampak	Perubahan dan Penerimaan
D1	0,756	0,662	0,949	0,788
D2	0,665	0,602	0,935	0,805
PP1	0,725	0,636	0,702	0,831
PP2	0,519	0,498	0,667	0,767
PP3	0,744	0,767	0,666	0,863
PP4	0,748	0,781	0,607	0,809

Table 4. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan semua item pengukuran dari variabel dampak serta variabel perubahan dan penerimaan berkorelasi lebih tinggi dengan variabelnya masing-masing daripada berkorelasi dengan variabel yang lain. Korelasi yang lebih tinggi tersebut memiliki arti variabel dampak serta variabel perubahan dan penerimaan membagi variansnya lebih kuat kepada item pengukurnya, sehingga hasil evaluasi discriminant validity dapat diterima (Hair et al., 2019).

Evaluasi model pengukuran yang kedua adalah evaluasi pada variabel isi kebijakan (X1) dan konteks implementasi (X2) yang memiliki indikator formatif. Evaluasi model pengukuran formatif harus memenuhi dua langkah evaluasi, yaitu *indicator collinearity* dan *statistical significance and relevance of the indicator weights*. Berikut ini merupakan penjelasan dari hasil kedua uji tersebut.

e) Indicator Collinierity

Evaluasi indicator collinearity dilakukan dengan memeriksa nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berikut ini merupakan nilai VIF dari hasil olah data yang telah dilakukan penulis.

Variabel	Item	VIF	Keterangan
Kebijakan (X1)	LK1	3.403	Bebas
	LK2	4.245	Bebas
	LK3	1.913	Bebas
	LK4	3.293	Bebas
	LK5	2.809	Bebas
	LK6	2.974	Bebas
Konteks Implementasi (X2)	KL1	4.145	Bebas
	KL2	2.518	Bebas
	KL3	3.624	Bebas
	KL4	4.263	Bebas
	KL5	3.637	Bebas
	LK6	3.601	Bebas

Table 5. Nilai Variance Inflation Factor (VIF)
Sumber: data diolah, 2024

Nilai VIF sebesar 5 atau lebih tinggi menunjukkan adanya masalah kolinearitas di antara item yang diukur (Hair et al., 2021). Nilai VIF yang diperiksa penulis telah dipaparkan pada tabel di atas dan diketahui bahwa semua item yang menyusun variabel isi kebijakan maupun konteks implementasi bebas dari masalah kolinearitas.

f) *Statistical Significance and Relevance of the Indicator Weights*

Evaluasi *Statistical Significance* and *Relevance of the Indicator Weights* diketahui dari nilai *Outer Weights* yang diperoleh setelah proses *bootstrapping*. Nilai *Outer Weights* harus berbobot signifikan dan diperiksa pada *p value* yang harus di bawah 0,05. Tabel 6 merupakan nilai *Outer Weights* dari hasil *Bootstrapping*.

Variabel	Item	P-Value	Keterangan
Kebijakan (X1)	LK1	0,410	Tidak signifikan
	LK2	0,100	Tidak signifikan
	LK3	0,675	Tidak signifikan
	LK4	0,002	Signifikan
	LK5	0,212	Tidak signifikan
	LK6	0,060	Tidak signifikan
Konteks Implementasi (X2)	KL1	0,841	Tidak signifikan
	KL2	0,006	Signifikan
	KL3	0,611	Tidak signifikan
	KL4	0,527	Tidak signifikan
	KL5	0,003	Signifikan
	LK6	0,002	Signifikan

Table 6. Nilai *Outer Weights*
Sumber: data diolah, 2024

Hair et al. (2021) mengungkapkan nilai *Outer Weights* yang signifikan ditandai dari nilai *p value* di bawah 0,05. Tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Outer Weights* yang berbobot signifikan hanya pada item IK4, KI2, KI5, dan KI6, serta mengindikasikan hanya item tersebut yang membentuk variabel dampak serta variabel perubahan dan penerimaan. Item yang lain bobotnya tidak signifikan dan dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari model, namun item tersebut sebaiknya tetap di dalam model (Diamantopoulos dan Winklhofer, 2001). Teori model pengukuran mengharuskan indikator sepenuhnya dapat menangkap keseluruhan domain konstruk, sehingga menghilangkan satu indikator saja dapat mengurangi validitas isi model pengukuran. Menurut Hair et al., (2021), item yang memiliki nilai *Outer Weights* tidak signifikan dapat tetap dimasukkan di dalam model jika nilai *Outer Loadings* di atas 0,5. Berikut adalah nilai *Outer Loadings* masing-masing item tersebut.

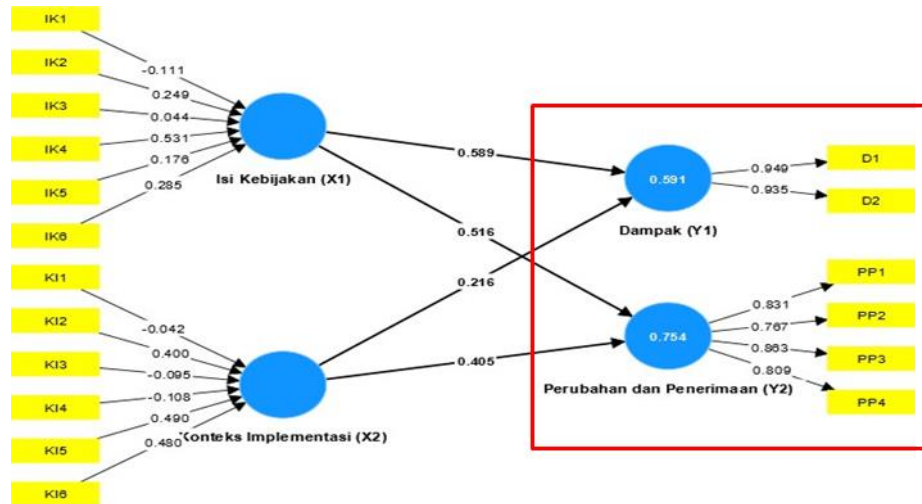
Variabel	Item	Outer Loadings
Kebijakan (X1)	LK1	0,752
	LK2	0,849
	LK3	0,690
	LK4	0,905
	LK5	0,785
	LK6	0,784
Konteks Implementasi (X2)	KL1	0,845
	KL2	0,815
	KL3	0,785
	KL4	0,807
	KL5	0,881
	LK6	0,915

Table 7. Nilai Outer Loadings
Sumber: data diolah, 2024

Tabel 7 menunjukkan nilai *Outer Loadings* pada seluruh item melebihi nilai minimal sebesar 0,5, sehingga item yang tidak signifikan pada nilai *Outer Weights* dapat dipertahankan di dalam model (Hair et al., 2021). Hasil olah data menyatakan seluruh item memiliki nilai *Outer Loadings* lebih dari 0,5, sehingga hasil evaluasi *Statistical Significance and Relevance of the Indicator Weights* dapat diterima.

4.1.2 Uji Hipotesis Penelitian

Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat software SmartPLS, diperoleh hasil koefisien dan p-value yang akan menjelaskan signifikansi pengaruh isi kebijakan dan konteks implementasi terhadap dampak dan perubahan dan penerimaan yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Hasil Analisis Data PLS

Peneliti telah mendapatkan hasil evaluasi model pengukuran dan model struktural yang baik, sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan proses bootstrapping, kemudian penulis memeriksa nilai path coefficient dan p value. Hipotesis dapat diterima apabila arah path coefficient sesuai dengan yang dihipotesiskan dan nilai p value kurang dari 0,05. Tabel 8 merupakan hasil dari kedua nilai tersebut.

Uraian	Path Coefficient	T Statistics	P-Value	Kesimpulan
X1 → Y1	0,589	3,977	0,000	Diterima
X1 → Y2	0,516	5,074	0,000	Diterima
X2 → Y1	0,216	1,685	0,092	Ditolak
X2 → Y2	0,415	4,838	0,000	Diterima

Table 8. Hasil Uji Hipotesis
Sumber: data diolah, 2024

Berikut merupakan penjelasan dari nilai *Path Coefficient* dan *p value* di tabel 8 diatas, yang telah diperoleh penulis dari proses *Bootstrapping*.

- Variabel isi kebijakan (X1) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,589, *t statistics* sebesar 3,977, dan *p value* sebesar 0,000 terhadap variabel dampak (Y1). Nilai *path coefficient* tersebut berarti jika isi kebijakan pada perbaikan jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro ditingkatkan sebesar satu satuan oleh pemerintah

Kabupaten Lamongan, maka dapat menghasilkan dampak positif pada masyarakat sebesar 58,9%. Variabel isi kebijakan (X1) juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel dampak (Y1) karena *p value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 1 diterima.

- b. Variabel isi kebijakan (X1) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,516, *t statistics* sebesar 5,074 dan *p value* sebesar 0,000 terhadap variabel perubahan dan penerimaan (Y2). Nilai *path coefficient* tersebut menandakan bahwa jika isi kebijakan pada perbaikan jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro ditingkatkan sebesar satu satuan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan, maka dapat menghasilkan perubahan dan penerimaan positif dari masyarakat sebesar 51,6%. Variabel isi kebijakan (X1) juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel perubahan dan penerimaan (Y2) karena *p value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 2 diterima.
- c. Variabel konteks implementasi (X2) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,216, *t statistics* sebesar 1,685, dan *p value* sebesar 0,092 terhadap variabel dampak (Y1). Nilai *path coefficient* tersebut menandakan bahwa jika konteks implementasi pada perbaikan jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro ditingkatkan satu satuan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan, maka menghasilkan dampak positif pada masyarakat sebesar 21,6%. Variabel konteks implementasi (X2) juga tidak berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap variabel dampak pada masyarakat (Y1) karena *p value* 0,92 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 3 ditolak.
- d. Variabel konteks implementasi (X2) menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,415, *t statistics* sebesar 4,838 dan *p value* sebesar 0,000 terhadap variabel perubahan dan penerimaan (Y2). Nilai *path coefficient* tersebut menandakan bahwa jika konteks implementasi pada perbaikan jalan raya ruas Sukodadi- Sumberwudi di Desa Pucangro ditingkatkan satu satuan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan, maka dapat menghasilkan perubahan dan penerimaan positif dari masyarakat sebesar 41,5%. Variabel konteks implementasi (X2) juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel perubahan dan penerimaan (Y2) karena *p value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 4 diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Isi Kebijakan terhadap Masyarakat

Hasil pengujian telah memberikan bukti empiris bahwa isi kebijakan pada kebijakan Jamula jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro berpengaruh positif dan signifikan terhadap dampak pada masyarakat Kabupaten Lamongan, sehingga hipotesis satu diterima. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan teori model implementasi Merilee Grindle (1980) yang menyatakan isi kebijakan merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan untuk mencapai hasil berupa dampak yang diinginkan pada masyarakat. Isi kebijakan menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi karena kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki komprehensifitas isi, seperti memiliki tujuan yang jelas, telah diformulasikan melalui program dan proyek aksi, hingga dirancang dan didukung dengan sumber daya yang memadai (Grindle, 1980). Secara sederhana, kebijakan yang telah mempunyai isi atau substansi yang baik dapat membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik juga, sehingga dapat berdampak pada masyarakat dan tujuan kebijakan dapat tercapai. Isi kebijakan pada kebijakan Jamula ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro memiliki komprehensifitas substansi dan seluruhnya telah berjalan atau tercukupi sebagaimana mestinya, sehingga berpengaruh terhadap dampak pada masyarakat, seperti waktu tempuh perjalanan semakin efektif dan konsumsi bahan bakar semakin efisien.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Chairunnisa et al. (2023) yang menyatakan variabel isi kebijakan pada kebijakan keterbukaan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Serang berpengaruh positif terhadap dampak yang ditargetkan pada masyarakat. Beberapa indikator yang diukur seperti jelasnya kepentingan yang mempengaruhi, tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, dan pengambilan keputusan telah tercukupi dan berjalan dengan baik, sehingga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap dampak kebijakan pada masyarakat, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terkait aktivitas pemerintah Kota Serang. Kebijakan Jamula sebagai sebuah kebijakan publik memiliki tujuan utama, yaitu dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Tujuan tersebut sejalan dengan teori kebijakan publik dari Tahir (2011) yang memaknai kebijakan publik harus didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Adanya ketentuan hukum dan kewenangan merupakan bagian penting bagi isi kebijakan. Ketentuan hukum dan kewenangan juga

membantu pelaksana kebijakan untuk mempermudah implementasi kebijakan publik, sehingga dapat mencapai dampak kebijakan yang diinginkan, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Handoyo, 2012) maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Suaib et al., 2022).

4.2.2 Pengaruh Isi Kebijakan terhadap Tingkat Perubahan dan Penerimaan Masyarakat

Hasil pengujian telah membuktikan secara empiris bahwa isi kebijakan pada kebijakan Jamula jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perubahan dan penerimaan dari masyarakat Kabupaten Lamongan, sehingga hipotesis dua dapat diterima. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan teori model implementasi merilee grindle (1980) yang menyatakan isi kebijakan merupakan variabel yang mempengaruhi hasil kebijakan berupa tingkat perubahan dan penerimaan yang diharapkan dari masyarakat selaku penerima kebijakan.

Pengaruh isi kebijakan terhadap perubahan dan penerimaan masyarakat digambarkan seperti pengaruh isi kebijakan terhadap dampak pada masyarakat. Kebijakan yang telah memiliki isi atau substansi yang baik dapat membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik juga. Apabila implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan dapat tercapai. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Grindle (1980) bahwa suatu kebijakan dapat berhasil jika dilihat dari sudut pandang proses, namun dapat berlaku gagal jika dilihat dari sudut pandang hasil. Implementasi kebijakan dinilai berhasil jika program-program yang dilakukan dapat menghasilkan perubahan dan penerimaan seperti yang diharapkan, sehingga mengindikasikan pentingnya konsistensi antara proses implementasi yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh penerima kebijakan. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Febrianti et al. (2023) yang memberikan bukti empiris mengenai pengaruh isi kebijakan pada kebijakan pembangunan jalan raya di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor berpengaruh positif terhadap perubahan dan penerimaan masyarakat sekitar. Indikator yang diukur seperti kejelasan pelaksana program dan tugasnya, sumber daya yang dibutuhkan, hingga derajat perubahan yang diharapkan telah menunjukkan pengaruh penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan menghasilkan tingkat kepuasan yang sangat baik dari masyarakat selaku penerima kebijakan.

4.2.3 Pengaruh Konteks Implementasi terhadap Masyarakat

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa konteks implementasi pada kebijakan Jamula jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dampak pada masyarakat Kabupaten Lamongan, sehingga hipotesis tiga dapat ditolak. Hasil pengujian tersebut tidak sejalan dengan teori model implementasi merilee grindle (1980) yang menjelaskan konteks implementasi merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan untuk mencapai hasil berupa dampak yang diinginkan pada masyarakat. Hasil pengujian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Suryani et al. (2021) bahwa konteks implementasi pada kebijakan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung berpengaruh positif dan signifikan terhadap dampak yang diterima pegawai selaku penerima kebijakan. Konteks implementasi kebijakan tersebut memberikan pengaruh sebesar 55,08% terhadap dampak yang dihasilkan pada kinerja pegawai yang meliputi peningkatan kuantitas pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan, kreativitas, hingga kerja sama.

Walaupun konteks implementasi tidak berpengaruh terhadap dampak pada masyarakat, namun penulis juga menemukan penelitian yang tidak sesuai dengan model implementasi merilee grindle sekaligus sependapat dengan hasil pengujian hipotesis tiga. Penelitian Ameer dan Sugiyanto (2021) mengemukakan konteks implementasi pada kebijakan perbaikan jalan raya nasional di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tidak berpengaruh positif terhadap dampak pada masyarakat. Strategi implementasi yang digunakan pelaksana kebijakan berupa sistem buka tutup saat perbaikan dipandang tidak efektif. Strategi yang tidak efektif tersebut dapat terjadi karena jalan raya yang diteliti merupakan jalan yang padat kendaraan dan durasi perbaikan membutuhkan waktu yang lama, sehingga berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang semakin lama dan konsumsi bahan bakar menjadi semakin boros. Alasan tersebut dapat menjadi penyebab hasil pengujian hipotesis yang tidak signifikan karena jalan raya ruas Sukodadi- Sumberwudi di Desa Pucangro merupakan jalan raya yang padat pengguna karena wilayah yang strategis dan membutuhkan waktu perbaikan yang lama.

4.2.4 Pengaruh Konteks Implementasi terhadap Tingkat Perubahan dan Penerimaan Masyarakat

Hasil pengujian telah membuktikan secara empiris bahwa konteks implementasi pada kebijakan Jamula jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perubahan dan penerimaan dari masyarakat Kabupaten Lamongan, sehingga hipotesis empat dapat diterima. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan teori model implementasi merilee grindle (1980) yang menyatakan konteks implementasi merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan untuk mencapai hasil berupa tingkat perubahan dan penerimaan yang diharapkan dari masyarakat. Teori konteks implementasi yang mempengaruhi perubahan dan penerimaan dari masyarakat didukung dengan pendapat Grindle (1980) dan Supranto (1997). Target yang ingin dicapai sebagai hasil kebijakan dapat menjadi parameter derajat perubahan yang diharapkan, sedangkan target kebijakan dapat dicapai apabila proses implementasi berjalan dengan baik. Syarat implementasi kebijakan berjalan dengan baik apabila memiliki konteks implementasi yang baik dan mendukung (Grindle, 1980). Penerimaan terhadap konteks implementasi diibaratkan oleh Supranto (1997) dengan derajat kesukaan atau ketidaksukaan terhadap pengalaman yang diterima masyarakat. Konteks implementasi memiliki keterkaitan erat dengan pengalaman yang diterima masyarakat, misalnya berkaitan dengan kepatuhan dan daya tanggap. Apabila pelaksana program patuh dan sigap untuk mengerjakan perbaikan jalan sesuai dengan waktunya atau bahkan lebih cepat, maka akan memberikan pengalaman yang menyenangkan pada masyarakat sebagai pengguna jalan, sehingga masyarakat dapat menerima dan merasa puas dengan kebijakan tersebut.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Febrianti et al. (2023) yang memberikan bukti empiris konteks implementasi berpengaruh positif terhadap perubahan dan penerimaan masyarakat. Indikator konteks implementasi yang diukur pada kebijakan pembangunan jalan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor seperti strategi aktor yang terlibat dan karakteristik lembaga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang sangat tinggi. Strategi yang digunakan aktor atau pelaksana kebijakan dan kerja sama antar lembaga telah dianggap oleh masyarakat berada di tingkat yang baik, sehingga memunculkan kepuasan dan penerimaan dari masyarakat.

V. KESIMPULAN

Isi kebijakan pada kebijakan Jamula ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro memiliki komprehensifitas isi dan seluruhnya telah berjalan atau tercukupi, sehingga berpengaruh terhadap dampak pada masyarakat, seperti waktu tempuh perjalanan semakin efektif dan konsumsi bahan bakar semakin efisien. Kebijakan Jamula ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro telah memiliki komprehensifitas isi dan seluruhnya berjalan atau tercukupi, sehingga menunjukkan konsistensi antara keberhasilan proses implementasi yang dilakukan dengan perubahan dan penerimaan masyarakat. Jalan raya yang diteliti merupakan jalan yang padat kendaraan dan durasi perbaikan membutuhkan waktu yang lama, sehingga berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang semakin lama dan konsumsi bahan bakar menjadi semakin boros. Derajat perubahan dan penerimaan yang diharapkan dapat menjad parameter target kebijakan, sedangkan target kebijakan dapat dicapai apabila proses implementasi berjalan dengan baik.

Program Jamula telah memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, sehingga pemerintah di masa mendatang harus taat dan responsif dalam melakukan perbaikan jalan tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman positif bagi masyarakat sebagai pengguna jalan, sehingga kebijakan tersebut diterima dan memuaskan masyarakat.

REFERENSI

- Amri, A. (2019). PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KSP BALOTA KOTA PALOPO. *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.248>
- Aisyah, S., Saputra, E., Rozanda, N. E., dan Ahsyar, T. K. (2021). Evaluasi Usability Website Dinas Pendidikan Provinsi Riau Menggunakan Metode System Usability Scale. *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, 7(2), 125-132.
- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., dan Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lamongan. In *Seminar Nasional Hasil Skripsi* 1(1), 65-70.
- Ameer, M. A., dan Sugiyanto, S. (2021). Analisa Biaya Kerugian Karena Mengalami Kondisi Kemacetan Akibat Perbaikan Jalan Ditinjau dari Waktu Tunda Perjalanan dan Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan. *Rang Teknik Journal*, 4(1), 143-163.
- Aslur, S. S. U., dan Tukiman, T. (2023). Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula). *Jurnal Kebijakan Publik*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 78-84.
- Ayuningtias, I., dan Faisol, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Teori



- Marilee S. Grindle. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 2(1), 21-35.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: Routledge.
- Budijaji, W. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, 2(2), 127-133.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., dan Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45.
- Chen, Z., dan Li, X. (2021). Economic Impact of Transportation Infrastructure Investment Under the Belt and Road Initiative. *Asia Europe Journal*, 19(1), 131-159.
- Chin, W. (2000). Partial Least Squares for IS Researchers: An Overview and Presentation of Recent Advances Using the PLS Approach. *ICIS*, 2000, 741-742.
- Da Silva, L. M., dan Toda, H. (2021). Policy Implementation of Local Governments in Waste Management in Dili City, Timor Leste. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 1(1), 1-13.
- Deng, T. (2013). Impacts of Transport Infrastructure on Productivity and Economic Growth: Recent Advances and Research Challenges. *Transport Reviews*, 33(6), 686-699.
- Diamantopoulos, A., dan Winklhofer, H. M. (2001). Index Construction with Formative Indicators: An Alternative to Scale Development. *Journal of Marketing Research*, 38(2), 269-277.
- Febrianti, A. C., Iskandar, A., dan Rusliandy, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ciawi. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(2), 517- 529.
- Firnanda, A. D., dan Maruf, M. F. (2018). Kajian Aspek Responsivitas Pemerintah dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Raya Rute Nasional (Studi Pada Pengelolaan Jalan Raya Nasional di Kabupaten Lamongan). *Publika*, 6(7).
- Gagliardi, L., dan Percoco, M. (2016). The Impact of European Cohesion Policy in Urban and Rural Regions. *Regional Studies*, 51(6), 857–868.
- Gibbons, S., Lyytikäinen, T., Overman, H. G., dan Sanchis-Guarner, R. (2019). New Road Infrastructure: The Effects on Firms. *Journal of Urban Economics*, 110, 35-50.
- Grindle, M. S. (1980). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., dan Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using R: A Workbook* (p. 197). Cham: Springer Nature. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., dan Ringle, C. M. (2019). When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2-24.



- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.
- Harahap, L. K. (2020). Analisis SEM (Structural Equation Modelling) dengan SMARTPLS (Partial Least Square). Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Walisongo Semarang, 1(1).
- Hifzul Muiz, M., dan Sumarni, N. (2020). Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online di Era Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa. EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran, 1(2), 153-165.
- Idris, A. (2018). Ekonomi Publik. Yogyakarta: Deepublish. Iriyena, P., Naukoko, A. T., dan Siwu, H. F. D. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kaimana 2007-2017. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(02).
- Ji, J., Zou, Z., dan Tian, Y. (2019). Energy and Economic Impacts of China's 2016 Economic Investment Plan for Transport Infrastructure Construction: An Input-Output Path Analysis. Journal of Cleaner Production, 238.
- Kamaluddin, R. H. (2003). Ekonomi Transportasi. Karakteristik, Teori dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kartiko, Y. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ngawi Hijau Terhadap Perilaku Kewirausahaan Hijau Pelaku UMKM Pengolahan Kayu di Kabupaten Ngawi (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Khusaini, M. (2019). Ekonomi Publik. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kumalasari, D., dan Sukidjo, S. (2022). Implementation of Micro Business Productive Assistance Program. Economics Development Analysis Journal, 11(4), 454-469.
- Maryam, S., dan Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 4(1), 50-72.
- Massara, A., Arifin, W., Alifuddin, A., Ramadhan, M. F., dan Taufiq, M. (2021). Analisa Deformasi pada Campuran Aspal Beton Menggunakan Derbo dan Wetfix. Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 6(2), 61-67.
- Meyer, M. D., dan Miller E. J. (2001). Urban Transportation Planning 2nd Edition. New York: McGraw Hill.
- Mohmand, Y. T., Wang, A., dan Saeed, A. (2016). The Impact of Transportation Infrastructure on Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan. Transportation Letters, 9(2), 63-69.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., dan Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. JPAS (Journal of Public Administration Studies), 5(1), 33-38.
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., dan Respati, D. K. (2022). Konsep Dasar Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS. Tangerang Selatan: Pascal

**Books.**

- Neuman, W. L. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7th ed.). Jakarta: Indeks.
- Ng, C. P., Law, T. H., Jakarni, F. M., dan Kulanthayan, S. (2019). Road Infrastructure Development and Economic Growth. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 512(1).
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2023, 6 Maret). Bidang Infrastruktur Masih Dijadikan Preferensi Lamongan di Tahun 2023. Link URL: <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/8546>. Diakses pada 11 Maret 2023 pukul 17.25 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2022, 19 Juli). Ratakan Pembangunan Infrastruktur, Bupati Yes Realisasikan Program Super Prioritas Jamula dan Dana Dusun. Link URL: <https://lamongankab.go.id/beranda/prokopim/post/4769>. Diakses pada 11 Maret 2023 pukul 11.35 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2022, 3 Juni). Jamula, Program Super Prioritas Pemkab Lamongan. Link URL: <https://lamongankab.go.id/beranda/prokopim/post/4340>. Diakses pada 4 Maret 2023 pukul 16.12 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2021, 26 Agustus). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Link URL: https://lamongankab.go.id/beranda/documents/bappelitbangda/RPJMD%20KAB.%20LAMONGAN%202021-2026_compressed.pdf. Diakses pada 16 Mei 2023 pukul 12.15 WIB.
- Pradhan, R. P., dan Bagchi, T. P. (2013). Effect of Transportation Infrastructure on Economic Growth in India: The VECM Approach. *Research in Transportation Economics*, 38(1), 139-148.
- Prus, P., dan Sikora, M. (2021). The Impact of Transport Infrastructure on the Sustainable Development of the Region—Case Study. *Agriculture*, 11(4), 279.
- Seputra, I. I. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420.
- Sitorus, G. K., Rares, J., dan Plangiten, N. (2020). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91).
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., dan Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. (1997). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Publik untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Suryani, I., Rusli, B., dan Nurasa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai di BKPPD Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 153-162.
- Syahroni, F., Pribadi, U., dan Suranto, S. (2023). Implementation of the Spice Route Program in Aceh Province: Opportunities and Challenges as a World Cultural Heritage. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 72-91.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Waluyo, J. (2022). *Ekonomi Publik I: Teori Barang Publik*. Sleman: LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Wang, C., Lim, M. K., Zhang, X., Zhao, L., dan Lee, P. T. W. (2020). Railway and Road Infrastructure in the Belt and Road Initiative Countries: Estimating the Impact of Transport Infrastructure on Economic Growth. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 134, 288-307.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yunus, R., dan Anwar, A. I. (2021). *Ekonomi Publik*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.